



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : bahwa untuk tertib dan disiplinnya pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan asas-asas tata kelola keuangan daerah yang baik serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muna.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Muna.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna.
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Organisasi Perangkat Daerah.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknik dan unsur kewilayahan.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Alokasi Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Alokasi Dana Desa dibagi dengan jumlah desa di Kabupaten Muna.
21. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Pengelolaan adalah keseluruhan proses kegiatan, yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan panatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, serta pengawasan program yang wajib bagi Pemerintah Desa.
24. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 3

Tujuan penggunaan ADD untuk:

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian Desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

BAB II SUMBER DANA

Pasal 5

ADD Tahun Anggaran 2023 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023.

Pasal 6

ADD Tahun Anggaran 2023 merupakan pendapatan Pemerintah Desa melalui transfer dari Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.

BAB III BESARAN ADD

Pasal 7

Besaran ADD tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 66.172.072.900,- (enam puluh enam miliar seratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA CARA PERHITUNGAN DAN RINCIAN ADD

Pasal 8

- (1) Pengalokasian ADD dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Alokasi Dana Desa = Alokasi Dasar + Alokasi Formula.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa.
- (4) Penghitungan pengalokasian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ setiap Desa} = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (ADD-AD)$$

Keterangan:

| | | |
|----------------|---|--|
| AF setiap Desa | = | Alokasi Formula setiap Desa |
| Z1 | = | rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten Muna |
| Z2 | = | rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin desa di Kabupaten Muna |
| Z3 | = | rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Kabupaten Muna |
| Z4 | = | rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap IKG Desa di Kabupaten Muna |
| AD | = | besaran Alokasi Dasar |

BAB V
PRIORITAS PENGGUNAAN ADD

Pasal 9

Prioritas penggunaan ADD tahun anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Bupati mengenai pedoman penyusunan APB Desa tahun anggaran 2023.

BAB VI
PENYALURAN DANA

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap.
- (2) Tahap penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. tahap III pada bulan Agustus sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
 - d. tahap IV pada bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
- (3) Tahap penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan paling lambat minggu keempat tahap penyaluran atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen:
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023;
 - b. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2022;
 - c. Laporan Pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran 2022;
 - d. Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Adat Desa; *(jika ada)*
 - e. Keputusan Kepala Desa tentang Lembaga Adat Desa; *(jika ada)*
 - f. Keputusan Kepala Desa tentang Perangkat Desa dan RT;
 - g. Keputusan Kepala Desa tentang Imam Desa/Pendeta;
 - h. Keputusan Bupati tentang BPD;
 - i. Keputusan Ketua TP-PKK Kabupaten/Kecamatan tentang TP-PKK Desa;
 - j. Keputusan Kepala Desa tentang LPM;
 - k. Keputusan Kepala Desa tentang Karang Taruna;
 - l. Keputusan Kepala Desa tentang Dasa Wisma;
 - m. Keputusan Kepala Desa tentang Majelis Taklim;

- n. Keputusan Kepala Desa tentang Hansip Desa; dan
 - o. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap I.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - (3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengeluarkan rekomendasi penyaluran kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 12

- (1) Penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan dana tahap I;
 - b. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap II;
 - c. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa *(jika ada)*.
- (2) Laporan realisasi penggunaan dana tahap I dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Dalam hal laporan realisasi penggunaan dana tahap I dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap II telah lengkap, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengeluarkan rekomendasi penyaluran kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 13

- (1) Penyaluran tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan dana tahap II;
 - b. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap III;
 - c. Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa *(jika ada)*.
- (2) Laporan realisasi penggunaan dan tahap II dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Dalam hal laporan realisasi penggunaan dana tahap II dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap III telah lengkap, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengeluarkan rekomendasi penyaluran kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 14

- (1) Penyaluran tahap IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan dana tahap III;
 - b. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap IV;
 - c. Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa *(jika ada)*.
- (2) Laporan realisasi penggunaan dana tahap III dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Dalam hal laporan realisasi penggunaan dana tahap III dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap IV telah lengkap, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengeluarkan rekomendasi penyaluran kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 15

Jika salah satu syarat penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 tidak terpenuhi, maka proses penyaluran dana tidak bisa dilanjutkan.

Pasal 16

- (1) Pengajuan penyaluran ADD dari Rekening Kas Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa melakukan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat kuasa dari Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran.
- (3) Kuasa sebagaimana dimaksud ayat (1) bermaterai Rp. 10.000,-.

Pasal 17

- (1) Penyaluran dana ADD dilaksanakan dengan mekanisme transfer dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyaluran dana ADD ditransfer ke Rekening Kas Desa pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyaluran dana ADD dapat dilakukan setelah Kepala Desa membuat pernyataan di atas kertas bermaterai yang berisi kesediaan untuk bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana yang disalurkan dengan dilampiri dokumen dan surat permohonan penyaluran dana dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat.

Pasal 18

- (1) Pengambilan atau penarikan dana oleh Pemerintah Desa pada Rekening Kas Desa di bank yang ditunjuk dilakukan oleh Kepala Desa dan/atau Kepala Urusan Keuangan menurut persyaratan yang ditentukan oleh bank.
- (2) Sebelum pengambilan atau penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa membuka rekening atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Usulan untuk pencairan dana dilakukan melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atau surat permohonan pencairan dana.
- (2) Seluruh dokumen SPP atau surat permohonan pencairan dana diarsipkan dan ditatausahakan oleh Kepala Urusan Keuangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana adalah sebagai berikut:
 - a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Mei;
 - b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan Juli;
 - c. tahap III paling lambat minggu keempat bulan September; dan
 - d. tahap IV paling lambat minggu keempat bulan Desember.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD dilakukan sesuai ketentuan yang mengaturnya.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN SANKSI

Pasal 21

Pemerintah Desa Wajib:

- a. melengkapi dokumen penyaluran dana;
- b. menyetor laporan penggunaan dana tahun 2022;
- c. menyetor laporan penggunaan dana tahap sebelumnya; dan
- d. menyetor dokumen APB Desa dan RKP Desa tahun 2023.

Pasal 22

Dalam hal Pemerintah Desa belum melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, maka Pemerintah Desa bersangkutan dapat dikenakan sanksi penghentian sementara proses penyaluran dana.

BAB IX PENDAMPINGAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan ADD.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Camat.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dibantu pendamping profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Daerah.
- (4) Pendamping profesional sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam melaksanakan tugas pendampingan meliputi:
 - a. melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembinaan dan pengendalian Tenaga Pendamping;
 - b. membantu tim asistensi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam melaksanakan tugas asistensi hasil pembuatan desain dan Rincian Anggaran Biaya (RAB);
 - c. membantu tim sertifikasi kegiatan fisik yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam melaksanakan tugas sertifikasi;
 - d. mendampingi desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
- (5) Tata cara pendampingan dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri teknis terkait.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 01-03-2023
BUPATI MUNA,


LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH,


EDDY

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|-----------|
| UNIT/SATUAN KERJA | PARAF/TGL |
| SEKDA KAB. MUNA | 4 |
| ASISTEN I | 4 |
| BAGIAN HUKUM | 4 |
| PENGELOLA | 4 |
| DINAS PMD | 4 |

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2023 NOMOR....

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN 2023

RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA TAHUN 2023

| No. | Nama Desa | Alokasi Dasar | Jumlah Penduduk | | | | Jumlah Penduduk Miskin | | | Luas Wilayah | | | IKG | | | Total Bobot | Alokasi Berdasarkan Formula | Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) per-Desa |
|-----|--------------|---------------|-----------------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|--------------|-------|------|-------|-------|-------|-------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| | | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | | | |
| 1 | NAPALAKURA | 480.281.174 | 1.264 | 0,83% | 0,21% | 450 | 1,01% | 0,35% | 10,74 | 0,74% | 0,07% | 33 | 0,68% | 0,21% | 0,84% | 55.544.465 | 535.826.000 | |
| 2 | PENTIRO | 480.281.174 | 618 | 0,41% | 0,10% | 230 | 0,51% | 0,18% | 29,78 | 2,04% | 0,20% | 40 | 0,82% | 0,25% | 0,73% | 48.492.524 | 528.774.000 | |
| 3 | LANGKUMAPO | 480.281.174 | 1.024 | 0,67% | 0,17% | 301 | 0,67% | 0,24% | 13,67 | 0,94% | 0,09% | 29 | 0,60% | 0,18% | 0,68% | 44.872.139 | 525.153.000 | |
| 4 | LAMBIKU | 480.281.174 | 1.268 | 0,84% | 0,21% | 435 | 0,97% | 0,34% | 20,47 | 1,40% | 0,14% | 24 | 0,48% | 0,14% | 0,83% | 55.212.189 | 535.493.000 | |
| 5 | LANGKORONI | 480.281.174 | 1.076 | 0,71% | 0,18% | 461 | 1,03% | 0,36% | 4,69 | 0,32% | 0,03% | 27 | 0,56% | 0,17% | 0,74% | 48.823.066 | 529.104.000 | |
| 6 | LATOMPA | 480.281.174 | 898 | 0,59% | 0,15% | 194 | 0,43% | 0,15% | 10,57 | 0,72% | 0,07% | 34 | 0,69% | 0,21% | 0,58% | 38.279.077 | 518.560.000 | |
| 7 | RAIMUNA | 480.281.174 | 1.580 | 1,04% | 0,26% | 345 | 0,77% | 0,27% | 17,71 | 1,21% | 0,12% | 27 | 0,55% | 0,17% | 0,82% | 54.061.996 | 534.343.000 | |
| 8 | MALIGANO | 480.281.174 | 1.421 | 0,94% | 0,23% | 259 | 0,58% | 0,20% | 16,38 | 1,12% | 0,11% | 38 | 0,78% | 0,23% | 0,78% | 51.861.202 | 532.142.000 | |
| 9 | LAPOLE | 480.281.174 | 1.044 | 0,69% | 0,17% | 93 | 0,21% | 0,07% | 11,36 | 0,78% | 0,08% | 42 | 0,85% | 0,26% | 0,58% | 38.275.155 | 518.556.000 | |
| 10 | POHORUA | 480.281.174 | 924 | 0,61% | 0,15% | 286 | 0,64% | 0,22% | 16,91 | 1,16% | 0,12% | 50 | 1,03% | 0,31% | 0,80% | 52.927.134 | 533.208.000 | |
| 11 | WAMBONA | 480.281.174 | 1.298 | 0,86% | 0,21% | 537 | 1,20% | 0,42% | 46,52 | 3,18% | 0,32% | 30 | 0,61% | 0,18% | 1,14% | 75.168.292 | 555.449.000 | |
| 12 | BAKEALU | 480.281.174 | 815 | 0,21% | 0,05% | 118 | 0,26% | 0,09% | 3,71 | 0,25% | 0,03% | 66 | 1,36% | 0,41% | 0,58% | 38.147.864 | 518.429.000 | |
| 13 | PURE | 480.281.174 | 385 | 0,58% | 0,15% | 296 | 0,66% | 0,23% | 11,50 | 0,79% | 0,08% | 43 | 0,87% | 0,26% | 0,72% | 47.461.584 | 527.743.000 | |
| 14 | WAKORUMBA | 480.281.174 | 700 | 0,46% | 0,12% | 238 | 0,53% | 0,19% | 9,84 | 0,67% | 0,07% | 51 | 1,05% | 0,31% | 0,68% | 45.177.931 | 525.459.000 | |
| 15 | BANGUN SARI | 480.281.174 | 1.422 | 0,94% | 0,23% | 77 | 0,17% | 0,06% | 22,56 | 1,54% | 0,15% | 33 | 0,67% | 0,20% | 0,65% | 42.951.479 | 523.233.000 | |
| 16 | LABONE | 480.281.174 | 2.493 | 1,64% | 0,41% | 580 | 1,30% | 0,45% | 24,78 | 1,70% | 0,17% | 26 | 0,54% | 0,16% | 1,20% | 79.155.086 | 559.436.000 | |
| 17 | BONEA | 480.281.174 | 1.390 | 0,92% | 0,23% | 509 | 1,14% | 0,40% | 9,22 | 0,63% | 0,06% | 36 | 0,74% | 0,22% | 0,91% | 60.405.110 | 540.686.000 | |
| 18 | KOMBUNGO | 480.281.174 | 1.011 | 0,67% | 0,17% | 474 | 1,06% | 0,37% | 29,30 | 2,00% | 0,20% | 35 | 0,72% | 0,22% | 0,95% | 63.092.366 | 543.374.000 | |
| 19 | LABUNTI | 480.281.174 | 2.487 | 1,64% | 0,41% | 510 | 1,14% | 0,40% | 7,36 | 0,50% | 0,05% | 22 | 0,62% | 0,14% | 1,00% | 65.963.011 | 546.244.000 | |
| 20 | PARIDA | 480.281.174 | 1.142 | 0,75% | 0,19% | 338 | 0,76% | 0,26% | 5,04 | 0,34% | 0,03% | 30 | 0,62% | 0,19% | 0,67% | 44.537.254 | 524.818.000 | |
| 21 | LASALEPA | 480.281.174 | 1.734 | 1,14% | 0,29% | 309 | 0,69% | 0,24% | 7,15 | 0,49% | 0,05% | 38 | 0,78% | 0,23% | 0,81% | 53.646.948 | 533.928.000 | |
| 22 | WAWESA | 480.281.174 | 1.866 | 1,23% | 0,31% | 346 | 0,77% | 0,27% | 6,65 | 0,46% | 0,05% | 38 | 0,78% | 0,23% | 0,86% | 56.701.609 | 536.983.000 | |
| 23 | WAKORAMBU | 480.281.174 | 1.306 | 0,86% | 0,22% | 136 | 0,30% | 0,11% | 4,16 | 0,28% | 0,03% | 33 | 0,67% | 0,20% | 0,55% | 36.465.436 | 516.747.000 | |
| 24 | GHONSUME | 480.281.174 | 1.727 | 1,14% | 0,28% | 497 | 1,11% | 0,39% | 2,13 | 0,15% | 0,01% | 36 | 0,73% | 0,22% | 0,91% | 60.099.986 | 540.381.000 | |
| 25 | LAGASA | 480.281.174 | 3.172 | 2,09% | 0,52% | 1.158 | 2,59% | 0,91% | 1,11 | 0,08% | 0,01% | 28 | 0,57% | 0,17% | 1,61% | 106.308.655 | 586.590.000 | |
| 26 | GHONE BALANO | 480.281.174 | 772 | 0,51% | 0,13% | 296 | 0,66% | 0,23% | 0,98 | 0,07% | 0,01% | 42 | 0,86% | 0,26% | 0,62% | 41.323.160 | 521.604.000 | |
| 27 | LASUNAPA | 480.281.174 | 1.398 | 0,92% | 0,23% | 394 | 0,88% | 0,31% | 1,94 | 0,13% | 0,01% | 42 | 0,86% | 0,26% | 0,81% | 53.589.275 | 533.870.000 | |
| 28 | BANGGAI | 480.281.174 | 1.711 | 1,13% | 0,28% | 248 | 0,55% | 0,19% | 2,59 | 0,18% | 0,02% | 29 | 0,59% | 0,18% | 0,67% | 44.404.069 | 524.685.000 | |
| 29 | LIANGKOBORI | 480.281.174 | 1.832 | 1,21% | 0,30% | 799 | 1,79% | 0,63% | 4,10 | 0,28% | 0,03% | 20 | 0,42% | 0,12% | 1,08% | 71.494.171 | 551.775.000 | |
| 30 | MABOLU | 480.281.174 | 1.802 | 1,19% | 0,30% | 326 | 0,73% | 0,26% | 3,66 | 0,25% | 0,03% | 31 | 0,64% | 0,19% | 0,77% | 50.926.979 | 531.208.000 | |
| 31 | KONDONGIA | 480.281.174 | 2.423 | 1,60% | 0,40% | 619 | 1,38% | 0,48% | 8,04 | 0,55% | 0,05% | 32 | 0,66% | 0,20% | 1,14% | 75.233.204 | 555.514.000 | |
| 32 | WAARA | 480.281.174 | 1.329 | 0,89% | 0,22% | 233 | 0,52% | 0,18% | 3,51 | 0,24% | 0,02% | 18 | 0,38% | 0,11% | 0,54% | 35.606.466 | 515.888.000 | |
| 33 | MANTOBUA | 480.281.174 | 2.411 | 1,59% | 0,40% | 865 | 1,94% | 0,68% | 4,99 | 0,34% | 0,03% | 28 | 0,57% | 0,17% | 1,28% | 84.675.197 | 564.956.000 | |
| 34 | LOHIVA | 480.281.174 | 1.326 | 0,87% | 0,22% | 249 | 0,56% | 0,19% | 6,10 | 0,42% | 0,04% | 31 | 0,63% | 0,19% | 0,64% | 42.646.752 | 522.928.000 | |
| 35 | LOHIA | 480.281.174 | 1.867 | 1,23% | 0,31% | 465 | 1,04% | 0,36% | 8,04 | 0,55% | 0,05% | 29 | 0,59% | 0,18% | 0,90% | 59.782.748 | 540.064.000 | |
| 36 | KORIHI | 480.281.174 | 1.630 | 1,07% | 0,27% | 593 | 1,33% | 0,46% | 5,21 | 0,36% | 0,04% | 35 | 0,73% | 0,22% | 0,99% | 65.265.576 | 545.547.000 | |
| 37 | LAKARANTA | 480.281.174 | 1.098 | 0,72% | 0,18% | 447 | 1,00% | 0,35% | 4,99 | 0,34% | 0,03% | 38 | 0,78% | 0,23% | 0,80% | 52.799.800 | 533.081.000 | |
| 39 | LAKAPODO | 480.281.174 | 1.244 | 0,82% | 0,20% | 17 | 0,04% | 0,01% | 37,55 | 2,57% | 0,26% | 21 | 0,43% | 0,13% | 0,60% | 40.002.150 | 520.283.000 | |

| No. | Nama Desa | Alokasi Berdasarkan Formula | | | | | | | | | | | Alokasi Berdasarkan Formula | Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) per-Desa | | | |
|-----|-----------------|-----------------------------|------|-------|-----------------|-----|-------|------------------------|-------|-------|--------------|------|-----------------------------|---------------------------------------|-------|------------|-------------|
| | | Alokasi Dasar | | | Jumlah Penduduk | | | Jumlah Penduduk Miskin | | | Luas Wilayah | | | | IKG | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | | (12) | (13) | (14) |
| 38 | WAKADIA | 480.281.174 | 1790 | 1,18% | 0,29% | 780 | 1,75% | 0,61% | 12,73 | 0,87% | 0,09% | 32 | 0,66% | 0,20% | 1,19% | 78.753.703 | 559.035.000 |
| 40 | MATARAWA | 480.281.174 | 813 | 0,54% | 0,13% | 264 | 0,59% | 0,21% | 15,79 | 1,08% | 0,11% | 32 | 0,66% | 0,20% | 0,65% | 42.784.493 | 523.066.000 |
| 41 | BANGKALI BARAT | 480.281.174 | 994 | 0,65% | 0,16% | 140 | 0,31% | 0,11% | 2,44 | 0,17% | 0,02% | 30 | 0,61% | 0,18% | 0,47% | 31.356.745 | 511.638.000 |
| 42 | BANGKALI | 480.281.174 | 1686 | 1,11% | 0,28% | 211 | 0,47% | 0,17% | 4,04 | 0,28% | 0,03% | 35 | 0,71% | 0,21% | 0,68% | 45.244.584 | 525.526.000 |
| 43 | LABAHA | 480.281.174 | 1114 | 0,73% | 0,18% | 250 | 0,56% | 0,20% | 4,98 | 0,34% | 0,03% | 31 | 0,64% | 0,19% | 0,61% | 40.143.767 | 520.425.000 |
| 44 | LIABALANO | 480.281.174 | 1314 | 0,87% | 0,22% | 543 | 1,21% | 0,43% | 5,27 | 0,36% | 0,04% | 36 | 0,74% | 0,22% | 0,90% | 59.475.340 | 539.757.000 |
| 45 | LAPODIDI | 480.281.174 | 455 | 0,30% | 0,07% | 128 | 0,29% | 0,10% | 6,09 | 0,42% | 0,04% | 48 | 0,97% | 0,29% | 0,51% | 33.659.461 | 513.941.000 |
| 46 | BUNGI | 480.281.174 | 1736 | 1,14% | 0,29% | 818 | 1,83% | 0,64% | 13,56 | 0,93% | 0,09% | 32 | 0,65% | 0,20% | 1,22% | 80.432.250 | 560.713.000 |
| 47 | KONTUNAGA | 480.281.174 | 1561 | 1,03% | 0,26% | 572 | 1,28% | 0,45% | 6,03 | 0,41% | 0,04% | 30 | 0,61% | 0,18% | 0,93% | 61.495.187 | 541.776.000 |
| 48 | MADODO | 480.281.174 | 2362 | 1,56% | 0,39% | 596 | 1,33% | 0,47% | 10,97 | 0,75% | 0,08% | 24 | 0,50% | 0,15% | 1,08% | 71.526.389 | 551.808.000 |
| 49 | MASALILI | 480.281.174 | 1339 | 0,88% | 0,22% | 749 | 1,68% | 0,59% | 7,76 | 0,53% | 0,05% | 32 | 0,65% | 0,20% | 1,06% | 69.917.384 | 550.199.000 |
| 50 | KOMBA KOMBA | 480.281.174 | 1123 | 0,74% | 0,18% | 331 | 0,74% | 0,26% | 19,54 | 1,34% | 0,13% | 42 | 0,87% | 0,26% | 0,84% | 55.431.078 | 535.712.000 |
| 51 | KABANGKA | 480.281.174 | 647 | 0,43% | 0,11% | 215 | 0,48% | 0,17% | 3,31 | 0,23% | 0,02% | 57 | 1,17% | 0,35% | 0,65% | 42.896.583 | 523.178.000 |
| 52 | WAKOBULU AGUNG | 480.281.174 | 1984 | 1,31% | 0,33% | 93 | 0,21% | 0,07% | 11,51 | 0,79% | 0,08% | 27 | 0,56% | 0,17% | 0,65% | 42.731.330 | 523.013.000 |
| 53 | LUPIA | 480.281.174 | 1653 | 1,09% | 0,27% | 378 | 0,85% | 0,30% | 6,08 | 0,42% | 0,04% | 45 | 0,92% | 0,28% | 0,89% | 58.671.530 | 538.953.000 |
| 54 | SARIMULYO | 480.281.174 | 1573 | 1,04% | 0,26% | 131 | 0,29% | 0,10% | 9,78 | 0,67% | 0,07% | 42 | 0,86% | 0,26% | 0,69% | 45.466.464 | 525.748.000 |
| 55 | OENSULI | 480.281.174 | 866 | 0,57% | 0,14% | 184 | 0,41% | 0,14% | 22,18 | 1,52% | 0,15% | 50 | 1,02% | 0,31% | 0,74% | 49.223.783 | 529.505.000 |
| 56 | WANSUGI | 480.281.174 | 950 | 0,63% | 0,16% | 325 | 0,73% | 0,25% | 15,00 | 1,03% | 0,10% | 59 | 1,21% | 0,36% | 0,88% | 58.096.612 | 538.378.000 |
| 57 | WATALIKU | 480.281.174 | 469 | 0,31% | 0,08% | 82 | 0,18% | 0,06% | 3,12 | 0,21% | 0,02% | 51 | 1,05% | 0,31% | 0,48% | 31.560.792 | 511.842.000 |
| 58 | LAKANDITO | 480.281.174 | 897 | 0,59% | 0,15% | 187 | 0,42% | 0,15% | 4,80 | 0,33% | 0,03% | 31 | 0,63% | 0,19% | 0,52% | 34.215.554 | 514.497.000 |
| 59 | LAMANU | 480.281.174 | 1009 | 0,66% | 0,17% | 184 | 0,41% | 0,14% | 56,77 | 3,88% | 0,39% | 54 | 1,10% | 0,33% | 1,03% | 68.077.123 | 548.358.000 |
| 60 | KAWITE WITE | 480.281.174 | 1198 | 0,79% | 0,20% | 496 | 1,11% | 0,39% | 23,94 | 1,64% | 0,16% | 51 | 1,04% | 0,31% | 1,06% | 70.262.401 | 550.544.000 |
| 61 | BENTE | 480.281.174 | 1040 | 0,69% | 0,17% | 283 | 0,63% | 0,22% | 8,46 | 0,58% | 0,06% | 52 | 1,06% | 0,32% | 0,77% | 50.918.276 | 531.199.000 |
| 62 | BEA | 480.281.174 | 709 | 0,47% | 0,12% | 330 | 0,74% | 0,26% | 20,54 | 1,41% | 0,14% | 38 | 0,79% | 0,24% | 0,75% | 49.747.914 | 530.029.000 |
| 63 | RANGKA | 480.281.174 | 597 | 0,39% | 0,10% | 173 | 0,39% | 0,14% | 6,79 | 0,46% | 0,05% | 53 | 1,08% | 0,32% | 0,60% | 40.020.781 | 520.302.000 |
| 64 | KAMBAWUNA | 480.281.174 | 446 | 0,29% | 0,07% | 215 | 0,48% | 0,17% | 5,41 | 0,37% | 0,04% | 43 | 0,87% | 0,26% | 0,54% | 35.779.331 | 516.061.000 |
| 65 | KONTUMBERE | 480.281.174 | 2856 | 1,88% | 0,47% | 681 | 1,52% | 0,53% | 8,88 | 0,61% | 0,06% | 33 | 0,67% | 0,20% | 1,26% | 83.663.284 | 563.944.000 |
| 66 | LAMABO | 480.281.174 | 1216 | 0,80% | 0,20% | 497 | 1,11% | 0,39% | 7,77 | 0,53% | 0,05% | 39 | 0,79% | 0,24% | 0,88% | 58.259.025 | 538.540.000 |
| 67 | WANTIWORO | 480.281.174 | 1745 | 1,15% | 0,29% | 731 | 1,64% | 0,57% | 19,98 | 1,37% | 0,14% | 37 | 0,76% | 0,23% | 1,22% | 80.959.362 | 561.241.000 |
| 68 | KASAKA | 480.281.174 | 895 | 0,59% | 0,15% | 264 | 0,59% | 0,21% | 13,48 | 0,92% | 0,09% | 47 | 0,97% | 0,29% | 0,74% | 48.750.975 | 529.032.000 |
| 69 | LABULU BULU | 480.281.174 | 974 | 0,64% | 0,16% | 226 | 0,51% | 0,18% | 9,90 | 0,68% | 0,07% | 37 | 0,75% | 0,23% | 0,63% | 41.741.855 | 522.023.000 |
| 70 | LATAMPU | 480.281.174 | 387 | 0,25% | 0,06% | 114 | 0,26% | 0,09% | 4,07 | 0,28% | 0,03% | 49 | 1,01% | 0,30% | 0,48% | 31.998.789 | 512.280.000 |
| 71 | LAIBA | 480.281.174 | 1945 | 1,28% | 0,32% | 848 | 1,90% | 0,66% | 6,09 | 0,42% | 0,04% | 48 | 0,98% | 0,30% | 1,32% | 87.426.081 | 567.707.000 |
| 72 | WARAMBE | 480.281.174 | 1171 | 0,77% | 0,19% | 592 | 1,32% | 0,46% | 9,11 | 0,62% | 0,06% | 51 | 1,04% | 0,31% | 1,03% | 68.212.993 | 548.494.000 |
| 73 | PARIGI | 480.281.174 | 1121 | 0,74% | 0,18% | 478 | 1,07% | 0,37% | 20,49 | 1,40% | 0,14% | 54 | 1,10% | 0,33% | 1,03% | 68.053.425 | 548.335.000 |
| 74 | WAPUALJE | 480.281.174 | 753 | 0,50% | 0,12% | 386 | 0,86% | 0,30% | 9,94 | 0,68% | 0,07% | 48 | 0,98% | 0,29% | 0,79% | 52.225.500 | 532.507.000 |
| 75 | WAKUMORO | 480.281.174 | 1112 | 0,73% | 0,18% | 313 | 0,70% | 0,25% | 4,66 | 0,32% | 0,03% | 28 | 0,57% | 0,17% | 0,63% | 41.727.215 | 522.008.000 |
| 76 | BONE TONDO | 480.281.174 | 1046 | 0,69% | 0,17% | 383 | 0,86% | 0,30% | 8,98 | 0,61% | 0,06% | 38 | 0,77% | 0,23% | 0,76% | 50.591.389 | 530.873.000 |
| 77 | BONE KAINSETALA | 480.281.174 | 1364 | 0,90% | 0,22% | 258 | 0,58% | 0,20% | 27,06 | 1,85% | 0,19% | 33 | 0,68% | 0,20% | 0,82% | 53.999.269 | 534.280.000 |
| 78 | BONE LOLIBU | 480.281.174 | 930 | 0,61% | 0,15% | 454 | 1,02% | 0,36% | 11,07 | 0,76% | 0,08% | 39 | 0,80% | 0,24% | 0,82% | 54.580.105 | 534.861.000 |
| 79 | OELONGKO | 480.281.174 | 1606 | 1,06% | 0,26% | 496 | 1,11% | 0,39% | 10,79 | 0,74% | 0,07% | 46 | 0,93% | 0,28% | 1,01% | 66.625.278 | 546.906.000 |
| 80 | MATOMBURA | 480.281.174 | 1177 | 0,78% | 0,19% | 375 | 0,84% | 0,29% | 17,26 | 1,18% | 0,12% | 46 | 0,94% | 0,28% | 0,89% | 58.787.773 | 539.069.000 |
| 81 | LAHONTOHE | 480.281.174 | 1711 | 1,13% | 0,28% | 348 | 0,78% | 0,27% | 5,59 | 0,38% | 0,04% | 31 | 0,64% | 0,19% | 0,78% | 51.872.394 | 532.154.000 |
| 82 | LAMORENDE | 480.281.174 | 732 | 0,48% | 0,12% | 78 | 0,17% | 0,06% | 0,80 | 0,05% | 0,01% | 39 | 0,80% | 0,24% | 0,43% | 28.274.232 | 508.555.000 |
| 83 | LAKOLOGOU | 480.281.174 | 1916 | 1,26% | 0,32% | 581 | 1,30% | 0,45% | 13,78 | 0,94% | 0,09% | 38 | 0,77% | 0,23% | 1,10% | 72.563.230 | 552.844.000 |
| 84 | MATANO OE | 480.281.174 | 953 | 0,63% | 0,16% | 129 | 0,29% | 0,10% | 13,27 | 0,91% | 0,09% | 31 | 0,64% | 0,19% | 0,54% | 35.715.296 | 515.996.000 |
| 85 | LAPANDI | 480.281.174 | 828 | 0,55% | 0,14% | 258 | 0,58% | 0,20% | 20,73 | 1,42% | 0,14% | 37 | 0,76% | 0,23% | 0,71% | 46.935.794 | 527.217.000 |
| 86 | OEMPU | 480.281.174 | 3004 | 1,98% | 0,49% | 297 | 0,66% | 0,23% | 12,32 | 0,84% | 0,08% | 26 | 0,54% | 0,16% | 0,97% | 64.372.403 | 544.654.000 |

| No. | Nama Desa | Alokasi Dasar | Jumlah Penduduk | | | Jumlah Penduduk Miskin | | | Luas Wilayah | | | IKG | | | Total Bobot | Alokasi Berdasarkan Formula | Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) per-Desa |
|--------------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------|------------------------|------------------------------|------------|--------------|--------------------|------------|----------------------------|----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| | | | Jumlah Penduduk | Rasio Jumlah Penduduk | Bobot | Jumlah Penduduk Miskin | Rasio Jumlah Penduduk Miskin | Bobot | Luas Wilayah | Rasio Luas Wilayah | Bobot | Indeks Kesulitan Geografis | Rasio Indeks Kesulitan Geografis | Bobot | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (17) | (18) = (9) + (17) | |
| 87 | FONGKANIWA | 480.281.174 | 908 | 0,60% | 0,15% | 171 | 0,38% | 0,13% | 10,25 | 0,70% | 0,07% | 40 | 0,82% | 0,25% | 39.627.247 | 519.908.000 | |
| 88 | TANJUNG | 480.281.174 | 290 | 0,19% | 0,05% | 25 | 0,06% | 0,02% | 9,39 | 0,64% | 0,06% | 56 | 1,15% | 0,35% | 31.541.453 | 511.823.000 | |
| 89 | KOTANO WUNA | 480.281.174 | 1437 | 0,95% | 0,24% | 806 | 1,80% | 0,63% | 10,5 | 0,72% | 0,07% | 54 | 1,10% | 0,33% | 84.017.287 | 564.298.000 | |
| 90 | KOGHOLFANO | 480.281.174 | 791 | 0,52% | 0,13% | 486 | 1,09% | 0,38% | 13,78 | 0,94% | 0,09% | 66 | 1,35% | 0,40% | 66.748.547 | 547.030.000 | |
| 91 | POLA | 480.281.174 | 1.751 | 1,15% | 0,29% | 5 | 0,01% | 0,00% | 17,07 | 1,17% | 0,12% | 28 | 0,58% | 0,17% | 38.527.093 | 518.808.000 | |
| 92 | KAMOSOPE | 480.281.174 | 589 | 0,39% | 0,10% | 261 | 0,58% | 0,20% | 13,49 | 0,92% | 0,09% | 33 | 0,68% | 0,20% | 39.590.743 | 519.872.000 | |
| 93 | LIWUMTINGKI | 480.281.174 | 472 | 0,31% | 0,08% | 114 | 0,26% | 0,09% | 12,43 | 0,85% | 0,09% | 34 | 0,70% | 0,21% | 30.543.763 | 510.825.000 | |
| 94 | LABULAWA | 480.281.174 | 506 | 0,33% | 0,08% | 254 | 0,57% | 0,20% | 12,21 | 0,84% | 0,08% | 66 | 1,35% | 0,40% | 50.950.744 | 531.232.000 | |
| 95 | BUMBU | 480.281.174 | 644 | 0,42% | 0,11% | 224 | 0,50% | 0,18% | 18,46 | 1,26% | 0,13% | 50 | 1,03% | 0,31% | 47.411.299 | 527.692.000 | |
| 96 | KAFO FOO | 480.281.174 | 694 | 0,46% | 0,11% | 239 | 0,53% | 0,19% | 12,07 | 0,83% | 0,08% | 39 | 0,80% | 0,24% | 41.327.609 | 521.609.000 | |
| 97 | LEMBO | 480.281.174 | 809 | 0,53% | 0,13% | 278 | 0,62% | 0,22% | 15,21 | 1,04% | 0,10% | 44 | 0,90% | 0,27% | 47.979.560 | 528.269.000 | |
| 98 | KILAMBIBITO | 480.281.174 | 358 | 0,24% | 0,06% | 54 | 0,12% | 0,04% | 6,49 | 0,44% | 0,04% | 49 | 1,01% | 0,30% | 29.740.266 | 510.021.000 | |
| 99 | BAHUTARA | 480.281.174 | 1.107 | 0,73% | 0,18% | 412 | 0,92% | 0,32% | 6,36 | 0,44% | 0,04% | 35 | 0,72% | 0,22% | 50.622.702 | 530.904.000 | |
| 100 | KONTU KOWUNA | 480.281.174 | 727 | 0,48% | 0,12% | 211 | 0,47% | 0,17% | 6,21 | 0,42% | 0,04% | 52 | 1,06% | 0,32% | 42.615.837 | 522.897.000 | |
| 101 | LAGHORIO | 480.281.174 | 834 | 0,55% | 0,14% | 233 | 0,52% | 0,18% | 22,56 | 1,54% | 0,15% | 47 | 0,97% | 0,29% | 50.614.947 | 530.896.000 | |
| 102 | MAROBO | 480.281.174 | 1.727 | 1,14% | 0,28% | 874 | 1,96% | 0,68% | 13,05 | 0,89% | 0,09% | 37 | 0,77% | 0,23% | 85.215.658 | 565.497.000 | |
| 103 | WADOLAO | 480.281.174 | 1.166 | 0,77% | 0,19% | 514 | 1,15% | 0,40% | 12,00 | 0,82% | 0,08% | 57 | 1,16% | 0,35% | 67.796.750 | 548.078.000 | |
| 104 | PASIKUTA | 480.281.174 | 884 | 0,58% | 0,15% | 494 | 1,11% | 0,39% | 1,17 | 0,08% | 0,01% | 66 | 1,34% | 0,40% | 62.442.632 | 542.724.000 | |
| 105 | TAPITAPI | 480.281.174 | 2.395 | 1,58% | 0,39% | 1705 | 3,81% | 1,34% | 1,95 | 0,13% | 0,01% | 62 | 1,28% | 0,38% | 140.660.176 | 620.941.000 | |
| 106 | POAROHA | 480.281.174 | 786 | 0,52% | 0,13% | 488 | 1,09% | 0,38% | 12,23 | 0,84% | 0,08% | 44 | 0,90% | 0,27% | 57.245.246 | 537.526.000 | |
| 107 | WAALAE-ALE | 480.281.174 | 1.509 | 0,99% | 0,25% | 433 | 0,97% | 0,34% | 8,12 | 0,56% | 0,05% | 38 | 0,78% | 0,23% | 58.053.680 | 538.335.000 | |
| 108 | KALUDAWA | 480.281.174 | 455 | 0,30% | 0,07% | 116 | 0,26% | 0,09% | 55,92 | 3,83% | 0,38% | 42 | 0,86% | 0,26% | 53.453.224 | 533.734.000 | |
| 109 | LABASA | 480.281.174 | 1.265 | 0,83% | 0,21% | 343 | 0,77% | 0,27% | 9,31 | 0,64% | 0,06% | 30 | 0,60% | 0,18% | 47.767.646 | 528.049.000 | |
| 110 | WATONDO | 480.281.174 | 660 | 0,43% | 0,11% | 64 | 0,14% | 0,05% | 13,78 | 0,94% | 0,09% | 39 | 0,80% | 0,24% | 32.659.653 | 512.941.000 | |
| 111 | LIANOSA | 480.281.174 | 1.764 | 1,16% | 0,29% | 465 | 1,04% | 0,36% | 9,55 | 0,65% | 0,07% | 46 | 0,94% | 0,28% | 66.257.765 | 546.539.000 | |
| 112 | KOLESE | 480.281.174 | 1.008 | 0,66% | 0,17% | 373 | 0,83% | 0,29% | 11,87 | 0,81% | 0,08% | 38 | 0,78% | 0,23% | 51.151.797 | 531.433.000 | |
| 113 | TAMPUNABALE | 480.281.174 | 1.069 | 0,70% | 0,18% | 293 | 0,66% | 0,23% | 5,86 | 0,40% | 0,04% | 33 | 0,67% | 0,20% | 42.814.961 | 523.096.000 | |
| 114 | MATA INDAH | 480.281.174 | 993 | 0,65% | 0,16% | 200 | 0,45% | 0,16% | 10,96 | 0,75% | 0,07% | 54 | 1,10% | 0,33% | 48.066.435 | 528.348.000 | |
| 115 | LAMBELU | 480.281.174 | 1.439 | 0,95% | 0,24% | 369 | 0,83% | 0,29% | 18,94 | 1,30% | 0,13% | 33 | 0,67% | 0,20% | 56.655.815 | 536.937.000 | |
| 116 | BONE BONE | 480.281.174 | 583 | 0,38% | 0,10% | 129 | 0,29% | 0,10% | 13,26 | 0,91% | 0,09% | 50 | 1,02% | 0,31% | 39.326.488 | 519.608.000 | |
| 117 | LANOBAKE | 480.281.174 | 535 | 0,35% | 0,09% | 157 | 0,35% | 0,12% | 19,35 | 1,32% | 0,13% | 27 | 0,56% | 0,17% | 33.751.204 | 514.032.000 | |
| 118 | MOOLO | 480.281.174 | 1.059 | 0,70% | 0,17% | 181 | 0,40% | 0,14% | 19,35 | 1,32% | 0,13% | 27 | 0,56% | 0,17% | 40.468.022 | 520.749.000 | |
| 119 | BALUARA | 480.281.174 | 677 | 0,45% | 0,11% | 207 | 0,46% | 0,16% | 13,81 | 0,94% | 0,09% | 42 | 0,86% | 0,26% | 41.500.657 | 521.782.000 | |
| 120 | WANGKOLABU | 480.281.174 | 573 | 0,38% | 0,09% | 116 | 0,26% | 0,09% | 1,83 | 0,12% | 0,01% | 50 | 1,03% | 0,31% | 33.431.779 | 513.713.000 | |
| 121 | LAKARAMA | 480.281.174 | 1.322 | 0,87% | 0,22% | 373 | 0,83% | 0,29% | 14,26 | 0,98% | 0,10% | 30 | 0,61% | 0,18% | 52.370.688 | 532.652.000 | |
| 122 | MOASI | 480.281.174 | 1.082 | 0,71% | 0,18% | 414 | 0,93% | 0,32% | 6,23 | 0,43% | 0,04% | 36 | 0,73% | 0,22% | 50.524.774 | 530.806.000 | |
| 123 | RENDA | 480.281.174 | 470 | 0,31% | 0,08% | 79 | 0,18% | 0,06% | 2,13 | 0,15% | 0,01% | 49 | 1,00% | 0,30% | 30.022.843 | 510.309.900 | |
| 124 | BHONTU-BHONTU | 480.281.174 | 1.755 | 1,16% | 0,29% | 366 | 0,82% | 0,29% | 2,06 | 0,14% | 0,01% | 44 | 0,91% | 0,27% | 57.104.575 | 537.386.000 | |
| Total | | 59.554.865.610 | 151.768 | 100% | 25% | 44.699 | 100% | 35% | 1.461 | 100% | 10% | 4.886,18 | 100% | 30% | 6.617.207.290 | 66.172.076.900 | |

PARAF KARDINASI
 UNIT/SATURAN
 SEKDA
 ASISTEN
 BAC
 PE

| Bobot | |
|-------|-----|
| JP | 25% |
| AK | 35% |
| LW | 10% |
| IKG | 30% |

| Kontrol Penghitungan | |
|-------------------------------------|----------------|
| Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Kab. M | 66.172.072.900 |
| Pagu Desa Persiapan | |
| Pagu Desa Devenitif | 66.172.072.900 |
| Pagu Alokasi Dasar (90%) | 59.554.865.610 |
| Pagu Bagian Formula (10%) | 6.617.207.290 |
| Jumlah Desa | 124 |

BUPATI MUKTI
 LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA